



Analisis Pengendalian Internal terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran

**Franciska Denanda Rika Widiharsanti^{1*}, Mochammad Abdul Kodir²,
Embun Duriyany Soemarso³**
Politeknik Negeri Semarang^{1,2,3}

*Corresponding author, e-mail: franciskadenandarika@email.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Internal Control System, Distribution of People's Business Credit, Standard Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7414>

How to cite:

Widiharsanti F. D. R., Kodir M.A., Soemarso E.D. (2023). Analisis Pengendalian Internal terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 130–137. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7414>

Published by:

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

Internal control in a company is very important. Internal control will be used by the company as a guide in carrying out its operational activities. The purpose of this study was to determine the application of the internal control system in distributing people's business credit (KUR) implemented by PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Babadan Ungaran Sub-branch Office and to identify whether the internal control applied is in accordance with the control components according to the Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission (COSO), which includes the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The data used is qualitative data sourced from primary data and secondary data. Collecting data using interviews, questionnaires, and literature study. The writing method uses a descriptive qualitative method. The results of this study indicate that the implementation of the internal control system for the distribution of people's business loans (KUR) at PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Babadan Ungaran Sub-Branch Office has gone very well and the suitability of internal control components with internal control components according to the Committee of Sponsoring Organizations of the The Treadway Commission (COSO) has not fully complied with the risk assessment component, there are still bad credit and human error.



PENDAHULUAN

Salah satu jenis kredit adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan finansial pengusaha UMKM yang saat ini mulai berkembang pesat di masyarakat pada berbagai bidang seperti industri, pertanian, maupun peternakan. Jumlah UMKM yang semakin meningkat setiap tahunnya, menyebabkan penyaluran KUR inipun semakin bertambah penyalurannya untuk setiap tahun. KUR sejak Tahun 2007 sampai Desember 2014 telah terealisasi sebesar Rp.178,8 triliun dengan total debitur sebanyak 12,4 juta debitur (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023).

Kredit menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar pada sebuah bank, sehingga pengawasan dalam kegiatan kredit ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini karena kredit bermasalah khususnya kredit macet akan menimbulkan risiko bagi bank jika salah dalam mengambil tindakan penyelesaiannya. Untuk memperkecil risiko pada penyaluran kredit, maka pihak bank harus mampu mengelola sistem dan prosedur pengendalian internal dengan baik.

Hal serupa juga dapat terjadi pada penyaluran kredit di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran yang tidak selalu berjalan dengan lancar. Munculnya ketidاكلancaran pembayaran angsuran oleh debitur dapat disebabkan karena rendahnya pemahaman sistem pengendalian internal oleh para pegawai bank, khususnya bagian kredit. Pengendalian internal akan menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyaluran kredit sehingga dapat mengurangi adanya kredit bermasalah atau terlambat melakukan pembayaran oleh nasabah.

Lingkungan pengendalian merupakan lingkup kerja yang ada pada suatu perusahaan. Lingkungan pengendalian meliputi nilai integritas dan etika, filosofi serta gaya manajemen yang digunakan, struktur organisasi. Pembagian wewenang yang jelas serta jiwa integritas yang tinggi pada tiap bagian akan mendukung pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. Tidak jarang masih terdapat rangkap fungsi, seperti fungsi analisis dan fungsi survey serta tidak adanya perputaran jabatan secara rutin pada perusahaan tertentu.

Penaksiran risiko merupakan mitigasi yang dilakukan oleh pihak bank guna meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi. Melalui pemahaman risiko tersebut, manajemen dapat mengambil tindakan mitigasi, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian yang disebabkan oleh risiko tersebut.

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang disusun dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa pedoman yang dibuat oleh manajemen sudah dilaksanakan dengan baik. Menurut Hana Simanjuntak R.G.J., Syah H. (2020), menunjukkan bahwa terdapat *post check* setiap periode per bulan untuk pemeriksaan audit.

Dalam informasi dan komunikasi hal utama yang perlu diperhatikan adalah kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi, dimana transaksi harus dilaksanakan dengan teliti untuk mencegah adanya kesalahan dalam laporan keuangan. Pemantauan merupakan kegiatan yang bertujuan guna mengamati jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga jika terdapat hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai harapan, dapat segera ditangani.

Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran sudah berjalan dengan baik, maka perlu adanya perbandingan dengan sistem pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission*), yang meliputi 5 unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan sejumlah dana berdasarkan suatu perjanjian dan kesepakatan antara kreditur dan debitur, dimana debitur wajib membayarkannya dalam bentuk angsuran beserta bunga kredit sesuai waktu yang disepakati.

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sumber dana yang digunakan berasal sepenuhnya dari dana bank. Kredit usaha rakyat (KUR) meliputi berbagai bidang usaha, seperti pertanian, perindustrian, perikanan, kelautan, kehutanan hingga usaha jasa simpan pinjam. Usaha atau bisnis yang dijalankan oleh masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip-Prinsip Perkreditan

Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman pada penilaian kredit meliputi 7C yaitu:

1. *Character*, dimana calon debitur harus dianalisis berdasarkan sifat, karakter, serta kepribadiannya;
2. *Capacity*, calon debitur dianalisis berdasarkan kemampuannya dalam mengelola usaha serta menghasilkan keuntungan;
3. *Capital*, calon debitur dianalisis berdasarkan permodalan yang digunakan untuk usahanya;
4. *Collateral*, calon debitur dianalisis berdasarkan agunan yang dijamin pada pengajuan kredit;
5. *Condition of economic*, kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi penyaluran kredit;
6. *Constrain*, hambatan dan batasan yang memungkinkan calon debitur tidak bisa membuka usaha pada suatu tempat;
7. *Coverage*, asuransi yang digunakan ketika terjadi hal buruk yang tidak diinginkan.

Selain berdasarkan prinsip 7C, juga dilakukan penilaian dengan 3R, yang meliputi *Repayment* yaitu kemampuan calon debitur dalam membayarkan kewajibannya; *Return* yaitu kemampuan calon debitur dalam menghasilkan keuntungan, dan *Risk Bearing Ability* yaitu calon debitur dapat mengatasi risiko yang akan timbul dari usahanya. (Ariyanti dan Firdaus 2003:139) dan (Kasmir 2016:117)

Pengendalian Internal

Kegiatan operasional pada perusahaan harus diatur oleh suatu sistem, yang mana digunakan sebagai salah satu alat untuk mencegah kecurangan atau *fraud* yang akan terjadi. Pengendalian intern merupakan kegiatan mitigasi risiko untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan. Menurut Abdul Halim (2015:213) ada beberapa konsep dasar pengendalian intern. Konsep dasar tersebut meliputi:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern berupa serangkaian kegiatan yang akan mempengaruhi para pegawai dalam bertindak serta berhubungan dengan sarana prasarana suatu organisasi.
2. Pelaksanaan pengendalian intern akan berjalan efektif jika terdapat dukungan dari para bagian yang terlibat. Sehingga perlu adanya kordinasi antar satu pihak dengan pihak yang lain demi tercapainya pengendalian intern yang efektif.
3. Pengendalian intern diharapkan dapat mewujudkan tujuan yang meliputi pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasional.

Komponen-komponen Pengendalian Internal

Menurut (Mulyadi 2017:175) sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
Sarana prasarana yang terdapat pada suatu perusahaan atau organisasi merupakan lingkungan pengendalian yang mendukung tercapainya pengendalian intern yang baik.
2. Penaksiran Risiko
Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh perusahaan.
3. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang disusun dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa pedoman yang disusun oleh manajemen sudah dilaksanakan.
4. Informasi dan Komunikasi
Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merangkai, mengelompokkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu perusahaan.
5. Pemantauan
Pemantauan merupakan kegiatan yang bertujuan guna mengamati jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga jika terdapat hal-hal yang menyimpang dan tidak sesuai harapan, dapat segera ditangani.

METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh nantinya akan dianalisis dengan menguraikan dan mendeskripsikan serta dilatarbelakangi konsep dan teori, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif. Untuk teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner untuk para pegawai pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran, serta dengan studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1. Tahap Pendekatan Calon Debitur
Pada tahap awal, pegawai bank bagian pemasaran melakukan pendekatan terhadap calon debitur dengan memberikan informasi mengenai kredit usaha rakyat melalui brosur yang berisi tabel plafon pinjaman beserta bunga yang ditawarkan. Pegawai bank akan mengidentifikasi calon nasabah yang sesuai dengan kriteria sasaran penyaluran kredit usaha rakyat.
2. Tahap Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pada tahap pengajuan kredit, calon debitur menyerahkan formulir pengajuan kredit yang telah diisi lengkap beserta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti kartu identitas, pas photo, akta nikah, NPWP, Surat Keterangan Usaha, Sertifikat tanah untuk jaminan.
3. Tahap Analisis Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tahap analisis dilakukan dengan pengecekan data debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), kemudian melakukan kunjungan ke tempat usaha debitur untuk memastikan usaha yang dijalankan benar-benar milik debitur terkait. Pada proses kunjungan setempat atau *on the spot* dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan bank untuk menggali informasi tentang calon debitur. Kunjungan setempat juga dapat dilakukan oleh pegawai bank bagian pemasaran ataupun bagian analisis kredit secara langsung. Kunjungan setempat ini diperlukan untuk melakukan wawancara dengan calon debitur ataupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan calon debitur. Hasil dari kunjungan ini digunakan untuk memverifikasi kegiatan dan perkembangan usaha yang dijalankan debitur.
4. Tahap Keputusan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Tahap keputusan kredit merupakan tahap dimana kredit yang diajukan calon debitur akan direalisasikan atau ditolak oleh bank berdasarkan penilaian kredit yang dilakukan oleh analisis kredit.
5. Tahap Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Perjanjian atau akad kredit harus ditandatangani oleh debitur yang benar-benar mengajukan permohonan kredit, dengan dibuktikan menunjukkan identitas aslinya pada pihak bank. Apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan calon debitur tidak dapat menandatangani perjanjian kredit secara langsung, maka kredit tidak dapat dicairkan. Pada tahap ini, kreditur juga melakukan pengikatan jaminan atas agunan yang diberikan calon debitur, sehingga apabila kredit selesai waktunya maka hak tanggungan dapat dihapus melalui *accessoir*.
6. Tahap Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pada tahap ini, debitur akan diberikan nota debit dan kredit serta slip penarikan untuk melakukan pencairan kredit. Kemudian, legal dan admin kredit melakukan penginputan pada *Inter Banking System* sesuai dengan data debitur yang meliputi data diri debitur, agunan yang diberikan serta asuransi kredit usaha rakyat.
7. Tahap Pemantauan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pemantauan kredit atau *monitoring* merupakan kegiatan yang dilakukan bank untuk memantau keadaan usaha nasabah dan bagaimana kualitas kredit nasabah dari pencairan kredit hingga kredit tersebut akan lunas.
8. Tahap Penyelamatan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan oleh bank terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah namun memiliki perkembangan usaha yang baik dan memiliki itikad untuk

membayar.

9. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Penyelesaian kredit terjadi pada bank karena usaha yang dilakukan debitur mengalami masalah sehingga menyebabkan ketidakmampuan debitur dalam melunasi kewajibannya. Kolektibilitas kredit digolongkan menjadi kolektibilitas lancar, kolektibilitas dalam perhatian khusus, kolektibilitas kurang lancar, kolektibilitas diragukan, dan kolektibilitas macet.

Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit modal kerja / investasi untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan plafond maksimal Rp 500.000.000

1. Fitur-fitur Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- a. Proses Kredit Mudah dan Cepat
- b. Suku bunga 6 % setara 0,26% / Bulan Flatt
- c. Bebas biaya Bank (Provisi, Administrasi dan Asuransi)
- d. Plafond Kredit Super Mikro maksimal Rp. 10 Juta
- e. Plafond Kredit Mikro Rp.10 Juta s/d Rp.50 juta
- f. Plafond Kredit Kecil Rp.50 Juta s/d Rp.500.000.000
- g. Jangka Waktu
 - 1) Modal Kerja : Super Mikro dan Mikro 3 tahun serta Kecil 4 tahun
 - 2) Investasi : Super Mikro, Mikro dan Kecil 5 tahun

2. Syarat & Ketentuan

- a. Mengisi formulir aplikasi pengajuan kredit
- b. *Fotocopy* KTP, *Fotocopy* Kartu Keluarga, dan *Fotocopy* NPWP
- c. Surat Keterangan Usaa/SIUP/Ijin Praktak/Profesi
- d. Asli /Salinan Slip Gaji untuk pegawai
- e. Laporan laba rugi dan keuangan untuk badan usaha/koperasi.

3. Layanan yang ada pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jateng yaitu:

- a. Proses Kredit Mudah dan Cepat
- b. Suku bunga 6 % setara 0,26% / Bulan Flatt
- c. Plafond Kredit Super Mikro maksimal Rp 10.000.000
- d. Plafond Kredit Mikro Rp 10.000.000 s/d Rp 50.000.000
- e. Plafond Kredit Kecil Rp 50.000.000 s/d Rp 500.000.000
- f. Jangka Waktu
 - 1) Modal Kerja: Super Mikro dan Mikro 3 tahun dan Kecil 4 tahun
 - 2) Investasi: Super Mikro, Mikro dan Kecil 5 tahun

Penilaian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Proses penilaian atas usaha debitur dilakukan dengan menganalisis 7C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*

Pada prinsip ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran akan menilai karakter atau watak serta sifat dari calon debitur untuk mengetahui sejauh mana kemauan dan tanggung jawab calon debitur untuk membayar kewajibannya. Karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang calon debitur yang paling utama adalah jujur dan bertanggung jawab.

2. *Capacity*

Pada prinsip ini, calon debitur dinilai kapasitas usaha yang dimiliki serta bagaimana pengelolaan manajemennya sehingga pihak bank dapat mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar kewajibannya. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran akan melihat secara langsung usaha yang dijalankan calon debitur untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam menghasilkan keuntungan.

3. *Capital*

Pada prinsip ini, calon debitur dinilai bagaimana kecukupan modal yang dapat dilihat dari laporan keuangan atau aset yang digunakan dalam menjalankan usahanya sehingga PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dapat mengetahui apakah calon

debitur dapat melunasi kewajibannya secara tepat waktu.

4. *Condition of economic*

Pada prinsip ini, calon debitur dinilai mengenai dua aspek yaitu kondisi internal yaitu berkaitan dengan manajemen usaha sehingga mempengaruhi perkembangan usaha dan kondisi eksternal yaitu meliputi kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang berpotensi mengancam keberlangsungan usahanya.

5. *Collateral*

Pada prinsip ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran akan melakukan penilaian atas jaminan yang diberikan kepada pihak bank. Jaminan digunakan apabila suatu saat terjadi masalah dalam kredit debitur dan tidak ada itikad baik dari yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajibannya.

6. *Constrain*

Pada prinsip ini, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran meninjau berdasarkan aspek apa saja yang menghambat usaha calon debitur dijalankan pada suatu tempat.

7. *Coverage*

Penilaian ini mencakup asuransi yang diberikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran kepada usaha calon debitur apabila terjadi hal buruk yang tidak diinginkan.

Selain berdasarkan prinsip 7C, penilaian atas usaha debitur juga berdasarkan 3R, yaitu:

1. *Return*, merupakan hasil usaha yang diperoleh calon debitur. Pihak bank akan menilai apakah calon debitur dapat mencapai laba yang maksimal atas usahanya setelah nantinya dilakukan realisasi kredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran.
2. *Repayment*, merupakan kemampuan usaha calon debitur dalam melakukan pembayaran kewajibannya atas kredit yang diterima, sehingga penting bagi bank untuk melakukan penilaian *repayment* atas usaha calon debitur.
3. *Risk Bearing Ability*, merupakan kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko jika terjadi kegagalan dalam usahanya. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran adalah meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi berbagai risiko atas usahanya dengan pengelolaan serta struktur modal yang baik.

Supervisi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan kunjungan setempat dilakukan oleh pegawai bank bagian kredit dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung perkembangan usaha debitur setelah penyaluran kredit dilakukan. Kunjungan setempat biasanya dilakukan secara berkala sekitar 6 bulan sampai 1 tahun setelah pencairan kredit. Kunjungan setempat secara berkala dilakukan dengan mengunjungi langsung usaha debitur sehingga pegawai bank benar-benar mengetahui bahwa debitur mengembangkan usahanya sesuai dengan perjanjian kredit.

Pihak bank juga akan meninjau ulang debitur-debitur yang sudah terealisasi kreditnya untuk memastikan bahwa pencairan kredit benar-benar digunakan sebagai modal dalam usahanya serta memajukan usahanya sehingga memiliki prosep yang baik. Selain itu, pihak bank juga secara berkala menghubungi debitur dan menanyakan perkembangan usaha yang telah menerima realisasi kredit.

Hasil Kuesioner Pengendalian Internal

Kuesioner pengendalian intern merupakan salah satu bentuk dokumentasi pemahaman atas pengendalian intern. Kuesioner diberikan kepada pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan aspek pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*.

Kuesioner pengendalian intern diajukan kepada perwakilan pegawai PT Bank Pembangunan Daerah

No	Komponen Pengendalian Internal	Prosentase Jawaban Ya (%)	Prosentase Jawaban Tidak (%)
1	Lingkungan Pengendalian	96%	4%
2	Penaksiran Risiko	93%	7%
3	Aktivitas Pengendalian	96%	4%
4	Informasi dan Komunikasi	95%	5%
5	Pemantauan	80%	20%
	Rata-rata	92%	8%

Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran yang terkait dengan penyaluran kredit usaha rakyat. Responden dari kuesioner pengendalian intern tersebut merupakan 5 pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyaluran kredit usaha rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran.

Tabel 1. Hasil Kuesioner Pengendalian Internal Penyaluran Kredit Usaha Rakyat

Sumber: Pengolahan data, 2023

Secara keseluruhan, prosentase jawaban “Ya” yang dihasilkan dalam kuesioner sistem pengendalian penyaluran kredit usaha rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran sebesar 92% yang mengindikasikan bahwa pengendalian internalnya sangat baik dan sudah dipahami oleh para pegawainya.

Kesesuaian Pengendalian Internal dengan teori COSO (*Committee of Sponsoring Organization*)

Kesesuaian penerapan sistem pengendalian intern terhadap penyaluran kredit usaha rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dengan komponen pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO), dinilai cukup sesuai walaupun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaannya. Pada komponen penaksiran risiko, terdapat risiko kredit macet dan *human error*. Namun, walaupun terdapat risiko kredit macet, perusahaan melakukan *reminder* kepada debitur. Selain itu bank juga melakukan kunjungan secara berkala untuk memantau usaha debitur apakah berjalan lancar atau tidak.

Untuk meminimalisir risiko kredit, ketika terdapat calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, maka bank melakukan BI *Checking* atau SLIK untuk mengetahui data dan riwayat calon debitur dalam membayarkan kewajibannya. Sedangkan untuk risiko *human error*, bank melakukan evaluasi kinerja bagi pegawai serta memberikan pelatihan berupa seminar atau pendidikan secara berkala mengenai produk perbankan, khususnya bagian kredit. Bank juga telah melakukan pemisahan tugas pada setiap pegawai, hal ini terlihat dengan adanya struktur organisasi beserta tugas dan wewenang tiap bagian. Sehingga para pegawai dapat dengan fokus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pengendalian Internal Terhadap Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Prosedur penyaluran kredit usaha rakyat yang dilakukan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dilaksanakan dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) yang ditetapkan perusahaan yaitu meliputi tahap permohonan kredit, analisis kredit, pemberian keputusan kredit, pencairan kredit, pemantauan kredit, penyelamatan, dan penyelesaian kredit.
2. Proses penilaian kredit usaha rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dilaksanakan berdasarkan prinsip 7C dan 3R, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Constraint*, dan *Coverage* serta *Return, Repayment*, dan *Risk Bearing Ability*.
3. Pelaksanaan supervisi kredit usaha rakyat pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dilakukan dengan melakukan kunjungan setempat secara berkala terhadap usaha debitur.

4. Penerapan pengendalian internal pada prosedur penyaluran kredit usaha rakyat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran berperan sangat baik dalam prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan hasil kuesiner 92%, walaupun masih terdapat sedikit kendala.
5. Kesesuaian komponen pengendalian internal terhadap penyaluran kredit usaha rakyat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Pembantu Babadan Ungaran dengan komponen pengendalian menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* belum sepenuhnya sesuai, terbukti masih adanya kredit macet dan *human error* pada komponen penakisran risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus, Rahmat., Maya Arianti. 2008. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Jakarta: Alfabeta.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Martono. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Ekonisia. Yogyakarta
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi Tiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Ketiga. Bandung: Alfabeta